

# **KEBIJAKAN FORMULATIF DALAM RANGKA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI**

## **SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas  
dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu ( S1)  
Ilmu Hukum dengan Kekhususan  
**HUKUM PIDANA**



Oleh :

**LAMHOT SIDAURUK**  
**NIM 2011-20-013**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MURIA KUDUS**

**2015**

HALAMAN PENGESAHAN  
KEBIJAKAN FORMULATIF DALAM RANGKA  
PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA AKIBAT  
TINDAK PIDANA KORUPSI

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas  
dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu ( S1)

Ilmu Hukum dengan Kekhususan

HUKUM PIDANA

Oleh :

LAMHOT SIDAURUK

NIM 2011-20-013

Kudus, 28 Februari 2015

Disetujui :

Pembimbing I,



Dr. Hidayatulloh, S.H.M.Hum.

Pembimbing II,



Wiwit Ariyani, S.H., M.Hum.

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum UMK



Ir. Sukresno, S.H.M.Hum.

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : LAMHOT SIDAURUK

NIM : 2011-20-013

Alamat : Desa Jatikulon No 88 Rt 06 Rw 01 Kecamatan Jati Kabupaten Kudus.

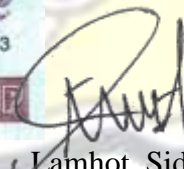
Judul Skripsi : Kebijakan Formulatif dalam Rangka Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing.
2. Dalam Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Muria Kudus.

Kudus, 28 Februari 2015



  
Lamhot Sidauruk

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*“ Aku percaya bahwa apapun yang aku terima saat ini adalah yang terbaik dari Tuhan dan aku percaya dia akan selalu memberikan yang terbaik untukku pada waktu yang telah ia tetapkan.”*

*“Awal dari kehidupan kita, bukanlah rencana kita, dan saat berakhirnya pun, bukan keputusan kita. Tetapi telah semakin jelas bagi kita bahwa tugas kita adalah menjadikan waktu antara yang awal dan akhir itu, sebagai sebuah perjalanan yang terindah yang bisa kita capai dengan upaya kita, dan dengan bantuan penuh kasih dari tangan yang tidak terlihat itu”.*



Kupersembahkan untuk :

1. Ibuku yang tersayang.
2. Almamaterku.
3. Teman-temanku semua.
4. kakakku.

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “KEBIJAKAN FORMULATIF DALAM RANGKA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI”.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan guna menyelesaikan studi Program Strata Satu ( S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.

Penulis mengakui sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini penulis melibatkan banyak pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bimbingan, bantuan serta petunjuk – petunjuk yang sangat berharga, yang telah diberikan kepada penulis dalam menyusun skripsi, maka untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Suparno, S.H, M.S selaku Rektor Universitas Muria Kudus.
2. Bapak Dr. Sukresno, S.H, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
3. Bapak Dr.Hidayattulloh, S.H, M.Hum selaku Dosen Pembimbing I, yang membimbing secara langsung sejak persiapan sampai akhir penulisan.
4. Ibu Wiwit Ariyani, S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing II, hingga penulisan skripsi ini tersusun.
5. Bapak dan Ibu Dosen beserta segenap karyawan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus, yang telah mendukung dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Tulhah Yasir,SH.MH selaku Jaksa Muda di Kejaksaan Negeri Kudus.
7. Semua pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materiil.

Mengingat skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan jauh dari sempurna, maka segala kritik dan saran yang positif penulis akan terima dengan senang hati.

Akhirnya semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Kudus, 28 Februari 2015

Penulis

LAMHOT SIDAURUK



## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “KEBIJAKAN FORMULATIF DALAM RANGKA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI” ini secara umum bertujuan untuk mengetahui kebijakan formatif dalam rangka pengembalian kerugian Negara, untuk mengetahui bagaimana menetapkan besarnya kerugian Negara dan untuk mengetahui pengembalian kerugian Negara dalam kasus No. No.2023 K/Pid.Sus/2013.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Dalam hal teknik pengumpulan data, penulis menggunakan data sekunder yang dilengkapi dengan wawancara.

Setelah data diperoleh, maka disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif, sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang dibahas dan selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah.

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa kebijakan formulasi dalam rangka pengembalian kerugian negara merupakan bentuk pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagai pidana tambahan, maka sanksi ini tidak dapat dijatuhkan tanpa adanya pidana pokok. Besarnya uang pengganti kerugian negara sebanyak-banyaknya sama dengan hasil tindak pidana yang dikorupsikan. Pembayaran uang pengganti paling lama 1 bulan setelah putusan *inkracht* (putusan yang berkekuatan hukum tetap). Apabila tidak dibayar dalam tempo 1 bulan, harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi kerugian negara yang ditimbulkan. Jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka akan dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokok dan lamanya pidana tersebut harus ditentukan dalam putusan pengadilan. Penilaian dan/atau penetapan jumlah kerugian Negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik karena sengaja atau lalai yang dilakukan oleh bendahara pengelola BUMN / BUMD dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan Negara adalah menjadi wewenang BPK, sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK. BPK memperoleh kewenangan sebagai lembaga pemeriksaan keuangan berdasarkan Pasal 23 E UUD 1945. Pengembalian kerugian Negara dalam putusan perkara No.2023 K/Pid.Sus/2013 oleh terpidana Akhmad Sanjali selaku direktur CV. Wira Usaha Mandiri sesuai putusan pengadilan yang telah *inkracht* didasarkan pada temuan BPKP sebesar Rp.19.572.960,- dan telah dibayarkan secara tunai sebelum batas waktu berakhir ( 1 bulan ).

**Kata Kunci : Kebijakan Formatif, Kerugian Negara, Korupsi**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAK SKRIPSI .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
 BAB I PENDAHULUAN .....	 1
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Kegunaan Penelitaian .....	5
E. Sistematika Penulisan .....	5
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	 7
A. Tindak Pidana Korupsi.....	7
1. Pengertian Tindak Pidana.....	7
2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	9
a) Pengertian Tindak Pidana Korupsi yang diatur dalam Pasal UUPTPK.....	10
b) Pengertian Tindak Pidana Korupsi yang diatur Pasal 2 dalam KUHP.....	15
c) Rumusan Tindak Pidana Korupsi pada UU No 31 Tahun 1999 Disempurnakan dalam UU No.20 Tahun 2001...	17

B. Kebijakan Sanksi Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi.....	20
1. Pidana.....	20
2. Tujuan Pidana.....	21
3. Kebijakan Sanksi Pidana.....	22
a) UU Tindak Pidana Korupsi.....	24
b) UU Tindak Pidana Pencucian Uang.....	27
c) RUU Perampasan Aset.....	28
C. Upaya Pengembalian Kerugian Negara.....	30
 BAB III METODE PENELITIAN.....	32
A. Metode Pendekatan.....	33
B. Spesifikasi Penelitian.....	34
C. Metode Pengumpulan Data.....	34
D. Metode Pengolahan dan Penyajian Data.....	36
E. Metode Analisis Data.....	37
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Kebijakan Formulatif dalam Rangka Pengembalian Kerugian Negara.....	39
B. Menetapkan Kerugian Negara.....	51
C. Pengembalian Kerugian Negara dalam Putusan Perkara No.2023 K/Pid.Sus/2013.....	59
1) Posisi Kasus.....	59
2) Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	64
3) Putusan Hakim.....	68
4) Analisa.....	70



BAB V PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

